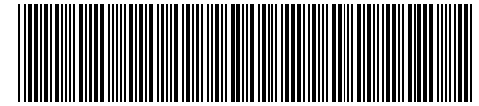




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.632441/2025**



DS:5434-9910-9780-4743

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
- Sebesar : Rp. 12.757.076.000 ( DUA BELAS MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN  
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	12.757.076.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 12.757.076.000

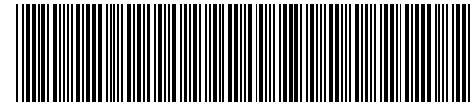
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025**



DS:5434-9910-9780-4743

Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

---

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	8.928.635.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	248.790.000
DR.4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	8.679.845.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.828.441.000
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.	3.828.441.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	8.928.635.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	248.790.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
	: 3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
	: 5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
	: 10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
	: 11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
	: 13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
	: 20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 22. 07	Persentase UMKM yang memenuhi standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



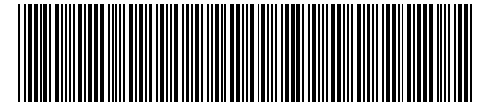
DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.BKB	Pemantauan produk	5,00	laporan	248.790.000
Rincian Output		:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	5,00	laporan	248.790.000
Kegiatan		:	4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan			8.679.845.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan			
		:	2. 02	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4135.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	4,00	Paket, Unit	17.398.000
Rincian Output		:	01 CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	4,00	Unit	17.398.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4135.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00	Unit	139.180.000
Rincian Output		:	01 CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	Unit	139.180.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4135.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.523.267.000
Rincian Output		:	01 PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan (PN)	5,00	Rekomendasi Kebijakan	8.523.267.000
Program		:	063.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3.828.441.000
Kegiatan		:	6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			3.828.441.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum			
		:	2. 01	Nilai Pengawasan Kearsipan			
		:	3. 02	indeks Pengelolaan Aset BPOM			
		:	4. 03	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Halaman : I A. 3

---

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.828.441.000	
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	7.648.000
		:	02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	3.820.793.000

---

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	12.757.076.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	12.757.076.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



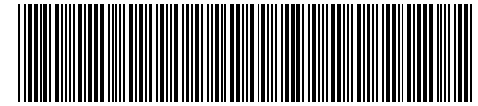
DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632441	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	2.905.542	9.303.956	547.578	-	-	12.757.076		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	8.381.057	547.578	-	-	8.928.635		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	248.790	-	-	-	248.790		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	248.790	-	-	-	248.790	01 . 51	
01	RM	-	248.790	-	-	-	248.790	175@	
4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	-	8.132.267	547.578	-	-	8.679.845		
4135.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	17.398	-	-	17.398	01 . 51	
01	RM	-	-	17.398	-	-	17.398	175	
4135.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	139.180	-	-	139.180	01 . 51	
01	RM	-	-	139.180	-	-	139.180	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4135.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.132.267	391.000	-	-	8.523.267	01 . 51	
01	RM	-	8.132.267	391.000	-	-	8.523.267	175@	
<b>063.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.905.542</b>	<b>922.899</b>	-	-	-	<b>3.828.441</b>		
<b>6384</b>	<b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM</b>	<b>2.905.542</b>	<b>922.899</b>	-	-	-	<b>3.828.441</b>		
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	2.905.542	922.899	-	-	-	3.828.441	01 . 51	
01	RM	2.905.542	922.899	-	-	-	3.828.441	175@	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.905.542</b>	<b>9.303.956</b>	<b>547.578</b>	-	-	<b>12.757.076</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (632441) PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

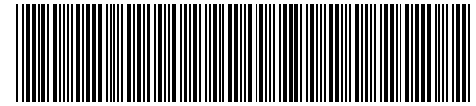
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	632441	<b>PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	916.392	968.420	1.020.448	1.170.448	1.075.448	1.380.884	1.170.448	1.020.448	1.020.402	1.004.661	1.003.874	1.005.202	12.757.076
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.277	2.905.542
		<b>BELANJA BARANG</b>	674.277	726.305	778.333	778.333	778.333	946.191	778.333	778.333	778.287	762.546	761.759	762.925	9.303.956
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	0	150.000	55.000	192.578	150.000	0	0	0	0	0	547.578
063.01.DR.3165		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.809	16.692	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.541	21.750	21.558	19.990	248.790
063.01.DR.4135		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	10.809	16.692	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.541	21.750	21.558	19.990	248.790
063.01.WA.6384		52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53 BELANJA MODAL Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	663.468	663.468	663.468	663.468	663.468	831.326	663.468	663.468	663.468	663.468	663.468	666.260	8.132.267
		51 BELANJA PEGAWAI	0	0	0	150.000	55.000	192.578	150.000	0	0	0	0	0	547.578
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	242.115	288.260	334.405	334.405	334.405	334.405	334.405	334.405	334.393	319.443	318.848	318.953	3.828.441
		51 BELANJA PEGAWAI	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.115	242.277	2.905.542
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	46.145	92.290	92.290	92.290	92.290	92.290	92.290	92.278	77.328	76.733	76.676	922.899

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632441] PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

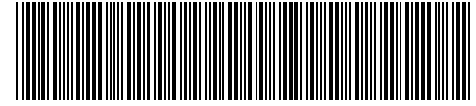
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
632441	<b>PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN</b>	063.01.DR 3165 3165.BKB	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.112.029		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 521.340
	52 Belanja Barang Rp. 1.112.029		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	<b>Pemantauan produk</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.630
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.545		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		<b>Program Dukungan Manajemen</b>
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM</b>
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	063.01.WA 6384 6384.EBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.670		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360	
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.594			
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
<b>Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
<b>Kebijakan Bidang Kesehatan</b>			
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 475.580		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 475.580	
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.310		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.310	
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.1.632441/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:5434-9910-9780-4743

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [632441] PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503